

PSEUDO DEMOKRASI DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM GERAKAN SERENTAK MEMBANGUN KAMPUNG (GSMK)

Selvi Diana Meilinda¹, Yulianto²
Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Lampung
yulianto4671@gmail.com

ABSTRAK

Dalam implementasi kebijakan, pendekatan yang biasa digunakan adalah pendekatan struktural (peran organisasi), pendekatan prosedural dan manajemen (*network planning and control; programme evaluation and review technique*), pendekatan perilaku (*behavioural*): komunikasi, informasi lengkap pada setiap tahap. serta pendekatan politis (aspek-aspek interdepartemental politik). hal ini menunjukkan bahwa pendekatan nilai termasuk dalam pendekatan politis, terutama nilai demokrasi dan ini belum dianalisis secara utuh, untuk itu peneliti menyelidik dalam studi kasus program gerakan serentak membangun kampung (GSMK) di Kabupaten Tulang Bawang Propinsi Lampung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang mendeskripsikan dan menjelaskan gejala-gejala dan kecenderungan dalam fenomena yang muncul di Kabupaten Tulang Bawang. Hasil yang didapatkan, implementasi program GSMK kurang didasari oleh nilai demokrasi seperti dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Nilai ini seharusnya memberikan ruh dalam pelaksanaan program GSMK di Kabupaten Tulang Bawang. Program GSMK menyentuh aspek politis karena lahir dari momentum kampanye bupati terpilih yakni suatu gerakan yang dilakukan oleh, dari, dan untuk masyarakat Kabupaten Tulang Bawang agar berbuat kebaikan secara bersama dalam upaya mempercepat pembangunan infrastruktur di 147 kampung secara serentak diseluruh wilayah Kabupaten Tulang Bawang dengan anggaran bersumber dari swadaya masyarakat, pihak swasta dari masing-masing kampung dan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) APBD Kabupaten Tulang Bawang. Program ini dinilai cukup berhasil oleh banyak kalangan, akan tetapi nilai demokrasi yang termuat dalam implementasinya hanya pura-pura (pseudo demokrasi) karena pelaksanaanyapun bersifat elitis.

Kata Kunci: pseudo demokrasi, Implementasi program, gerakan serentak membangun kampung.

PENDAHULUAN

Demokrasi merupakan spirit yang diterapkan hampir di semua sisi kehidupan berbangsa dan bernegara. Makna dari, oleh, dan untuk masyarakat memiliki perspektif yang cukup berpihak pada masyarakat dalam rangka mewujudkan keadilan sosial. Konsep demokrasi tidak hanya terpusat pada aspek politik dan pemerintahan, akan tetapi terdistribusi pada hal-hal teknis seperti implementasi kebijakan publik.

Implementasi kebijakan merupakan suatu tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan publik harus diimplementasikan agar mempunyai dampak yang dapat dirasakan oleh publik dan mencapai tujuan yang diinginkan. Implementasi dipandang dalam pengertian yang luas merupakan alat hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan (James P. Later dan Joseph Stewart dalam Winarno, 2005).

Sementara Pressman dan Wildavsky (1973), menjelaskan bahwa implementasi adalah proses interaksi antara penentu tujuan dan tindakan untuk mencapai tujuan. Pada dasarnya adalah kemampuan membangun hubungan dalam mata rantai sebab akibat agar kebijakan bisa

berdampak. Tujuan program harus didefinisikan secara jelas dan dipahami dengan baik, sumber daya harus disediakan, rantai komando harus bisa menyatukan dan mengontrol sumber daya tersebut, sistem harus berkomunikasi secara efektif dan mengontrol individu dan organisasi yang terlibat dalam pelaksanaan tugas (Parsons, 2008). Untuk dapat menganalisis demokrasi dalam implementasi kebijakan, peneliti akan menyelidik dalam studi kasus Program Gerakan Serentak Membangun Kampung (GSMK) di Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung. Program Gerakan Serentak Membangun Kampung (GSMK) merupakan salah satu program unggulan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang yang menjadi percontohan bagi seluruh desa di Indonesia.

Program ini telah dilaksanakan sebelum adanya undang-undang desa. Maksud dari Program Gerakan Serentak Membangun Kampung adalah suatu upaya Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang untuk mendorong adanya program pembangunan oleh, dari, dan untuk masyarakat agar memanfaatkan potensi dan pranata sosial khas yang ada di Tulang Bawang, dengan memberikan bantuan dana langsung sebagai stimulan kepada masyarakat kampung. Sebelumnya, hasil penelitian mengenai program ini menyatakan bahwa selama tahapan perencanaan, pelaksanaan, *monitoring* dan evaluasi ditemukan bahwa pada sebagian kampung yang mayoritasnya adalah pendudukan asli masyarakatnya kurang dilibatkan dalam perencanaan kegiatan sehingga pada tahap pelaksanaannya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat. Namun lain halnya pada kampung yang mayoritas penduduknya adalah pendatang, mereka sangat antusias dalam menjalankan program GSMK tersebut. Serta dalam hal pengawasan yang kurang oleh pemerintah terhadap implementasi program GSMK/ mengakibatkan hasil tidak sesuai dengan apa yang diharapkan Pemerintah.

Ada beberapa studi pendahuluan terkait implementasi program GSMK ini, Pada penelitian yang dilakukan (Asriani, 2013) yang berjudul —Implementasi Kebijakan Program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan (GSMK) di Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang— menjelaskan tentang bahwa selama tahapan perencanaan, pelaksanaan, *monitoring* dan evaluasi ditemukan bahwa pada sebagian kampung yang mayoritasnya adalah pendudukan asli masyarakatnya kurang dilibatkan dalam perencanaan kegiatan sehingga pada tahap pelaksanaannya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat. Namun lain halnya pada kampung yang mayoritas penduduknya adalah pendatang, mereka sangat antusias dalam menjalankan program GSMK tersebut. Serta dalam hal pengawasan yang kurang oleh pemerintah terhadap implementasi program GSMK/ mengakibatkan hasil tidak sesuai dengan apa yang diharapkan Pemerintah.

Selain itu, penelitian mengenai implementasi program GSMK juga dilakukan oleh Hendra Saputra yang berjudul —Keefektifan Program Gerakan Serentak Membangun Kampung (GSMK) Dalam Memberdayakan Masyarakat Pedesaan Di Kecamatan Rawa Pitu Kabupaten Tulang Bawang— . Penelitian ini menjelaskan bahwa: 1) efektivitas program GSMK dalam memberdayakan masyarakat pedesaan di Kecamatan Rawa Pitu Kabupaten Tulang Bawang sudah baik, karena tujuan khusus program GSMK sudah tercapai dan selain itu Program GSMK juga mampu menimbulkan rasa kepuasan dan kebanggaan terhadap hasil yang telah mereka lakukan, dan 2) terdapat hubungan yang positif antara pengetahuan masyarakat tentang Program GSMK, sikap setuju masyarakat terhadap Program GSMK, dan peranan Pokmas dalam Program GSMK dengan efektivitas Program GSMK di Kecamatan Rawa Pitu Kabupaten Tulang Bawang dengan taraf kepercayaan 95%. Semakin tinggi ketiga faktor di atas maka semakin tinggi efektivitas Program GSMK.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang mendeskripsikan dan menjelaskangejala-gejala dan kecenderungan dalam fenomena yang muncul di lokasi penelitian. Datayang dikumpulkan di lapangan adalah data kualitatif berbentuk kata dan perilaku, kalimat,skema, dan gambar (Moleong, 2000). Pendekatan ini digunakan untuk meneliti objek padakondisi yang alamiah, dimana peneliti adalah instrumen kunci dengan tehnik pengumpulandata dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data yang bersifat induktif dan hasilpenelitian yang lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2003).Selain itu, guna mendapatkan gambaran yang utuh tentang Demokrasi dalam implementasi program GSMK.

Pengumpulan data dilakukan pada tahun pertama yaitu tahun 2017. Dalam tahap ini dilakukan pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan dengan cara observasi, survei dan wawancara terstruktur. Observasi dilakukan di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Tulang Bawang sebagai Tim Pembina dan Koordinasi Tingkat Kabupaten. Hasil observasi pada dinas PMK ini adalah diperolehnya kondisi tim tingkat kabupaten yang ditunjuk oleh Bupati Tulang Bawang untuk bertanggungjawab atas program GSMK, pengetahuan dan pemahaman tim tentang program GSMK, serta hal lainnya yang dapat dijadikan sumber informasi dalam penelitian. Wawancara terstruktur juga dilakukan terhadap beberapa orang di Dinas PMK ini diantaranya adalah wawancara dengan Sekretaris Dinas PMK, Kepala Seksi Pembangunan Dinas PMK, dan 4 staf Seksi Pembangunan Dinas PMK. Wawancara terstruktur dilakukan dengan kondisi dan bahasa semi formal untuk menghindari situasi kaku dan perasaan dipojokkan dari informan. Wawancara ini dilakukan untuk menemukan jawaban atas pertanyaa-pertanyaan dalam penelitian sehingga data dalam penelitian terjawab dengan akurat dan terbukti.

Observasi dan wawancara juga dilakukan kepada aparat kampung yang dinobatkan sebagai kampung percontohan oleh Dinas PKM. Kampung Kagungan Rahayu, meskipun tidak setiap tahun memenangkan kategori pembangunan terbaik program GSMK, namun Kampung Kagungan Rahayu selalu mampu membangun infrastruktur lebih dari yang telah ditargetkan. Hal ini yang menyebabkan Kampung Kagungan Rahayu dianggap sebagai Kampung percontohan program GSMK. Observasi dilakukan di Kampung Kagungan Rahayu untuk membuktikan hasil pembangunan program GSMK, melihat kondisi budaya, dan kondusifitas Kampung atas perbedaan suku dan budaya. Wawancara juga dilakukan kepada Sekretaris Kampung tentang program GSMK meliputi implementasi, permasalahan sampai kepada pengaruh budaya dalam pembangunan Kampung. Alasan dilakukannya wawancara dengan Sekretaris Kampung adalah karena posisi Kepala Kampung yang sedang berada dalam kekosongan sehingga hanya ada Pelaksana Tugas (Plt) yang belum memahami banyak tentang implementasi program GSMK.

Sedangkan data sekunder dikumpulkan dengan mengidentifikasi sumber-sumber data yang mendukung kebutuhan penelitian.Data sekunder diperoleh dari Dinas PMK dan Pemerintah Kmapung Kagungan Rahayu. Data-data tersebut mampu menjadi pendukung data primer sehingga membantu menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Hasil dari tahap ini adalah diketahuinya demokrasi dalam implementasi program GSMK.

HASIL PENELITIAN

Program Gerakan Serentak Membangun Kampung (GSMK) merupakan program unggulan Bupati Tulang Bawang yaitu Ir. Hi. Hanan A. Rozak, MS serta wakil Bupati Tulang Bawang Heri Wardoyo, SH. Program GSMK yang berjalan sejak 2013 dan direncanakan akan

dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2013 –2017) yang dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan tahun anggaran kegiatan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.

Program GSMK merupakan suatu gerakan yang dilakukan oleh, dari, dan untuk masyarakat Kabupaten Tulang Bawang agar berbuat kebaikan secara bersama dalam upaya mempercepat pembangunan infrastruktur di 147 kampung secara serentak diseluruh wilayah Kabupaten Tulang Bawang dengan anggaran bersumber dari swadaya masyarakat, pihak swasta dari masing-masing kampung dan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) APBD Kabupaten Tulang Bawang.

Sesuai dengan yang tertera di Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Program GSMK, maksud dari Program GSMK adalah suatu upaya Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang untuk mendorong adanya program pembangunan dari, oleh dan untuk masyarakat dengan memanfaatkan potensi dan pranata sosial khas yang ada di Kabupaten Tulang Bawang, dengan memberikan bantuan dana langsung sebagai stimulan kepada masyarakat untuk pembangunan sarana dan prasarana (infrastruktur) yang sangat dibutuhkan dan bermanfaat untuk masyarakat.

Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 tentang Desa, program GSMK sudah mulai diimplementasikan dengan anggaran bersumber dari APBD Kabupaten Tulang Bawang sebesar Rp200 juta perkampung setiap tahunnya. Namun sejak diterapkannya Undang-Undang No.06 Tahun 2014 tentang Desa, mulai tahun 2015 anggaran GSMK masuk kedalam Alokasi Dana Desa (ADD) dan bertambah menjadi Rp225 juta per kampung yang bersumber dari dana desa APBD dan APBD Kabupaten Tulang Bawang.

Tujuan diterapkannya Program GSMK ini ialah agar dapat meningkatkan partisipasi masyarakat Kelurahan dalam pembangunan daerah melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat serta proses pembelajaran demokrasi dalam pembangunan. Selain itu juga program ini ditujukan untuk meningkatkan swadaya masyarakat Kelurahan dalam pelaksanaan dan pelestarian pembangunan, meningkatkan semangat gotong royong dan kebersamaan dalam melaksanakan proses pembangunan serta mempercepat pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan agar dapat menimbulkan rasa memiliki masyarakat Kelurahan terhadap hasil pembangunan yang dilakukan.

Dana GSMK yang langsung dialokasikan kepada masyarakat kampung sebesar Rp225 juta melalui tiga tahapan yaitu tahap I pencairan sebesar 40%, tahap II pencairan sebesar 40% dan tahap III pencairan 20% dengan dana dikelola oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang didampingi oleh Fasilitator Kecamatan. Pokmas merupakan ketua pelaksana teknis yang dibentuk oleh masyarakat kampung melalui musyawarah kampung yang melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh adat setempat. Selain Pokmas, dalam pengelolaan dana GSMK, kampung juga dibantu oleh fasilitator yang dipilih oleh kecamatan untuk mendampingi desa.

Hasil dari Musyawarah Kampung (Muskam) berupa kesepakatan mengenai infrastruktur yang akan dibangun dengan menggunakan dana GSMK diajukan kepada Pemerintah Daerah. Muskam melibatkan Pokmas, Aparatur Kampung, Fasilitator GSMK dan tokoh-tokoh masyarakat. Tujuan dari diadakannya Muskam ialah membentuk kesepakatan pembangunan infrastruktur apa saja yang sangat dibutuhkan kampung untuk mendapatkan persetujuan Bupati.

Sesuai yang sudah ditetapkan melalui Peraturan Bupati tentang GSMK, bahwa pembangunan infrastruktur meliputi pembangunan jalan *onderlagh*, pembangunan jembatan, pembangunan jalan lapis penetrasi, pembangunan saluran irigasi tersier, pembangunan talud, pembangunan *paving block*, dan pembangunan sumur bor. Pembangunan ini di *monitoring* oleh Tim Pembina dan Koordinasi Kecamatan dan Fasilitator Kecamatan yang selanjutnya kemajuan kegiatan GSMK dilaporkan kepada Bupati.

Keistimewaan program GSMK ialah adanya penghargaan bagi kampung terbaik yang dapat mengelola dana GSMK dengan efisien. Bentuk penilaian berupa fisik pembangunan antara perencanaan dan realisasi dilapangan. Terdapat tiga penghargaan kampung terbaik di setiap kecamatan, masing-masing kampung yang mendapat predikat juara I mendapat dana tambahan dana sebesar Rp50 juta, juara II mendapat tambahan dana Rp30 juta, dan juara III mendapat tambahan dana sebesar Rp20 juta. Kemudian dana tersebut diberikan pada pencairan GSMK tahun berikutnya. Keistimewaan lain yang membedakan program GSMK dengan program PNPB atau program-program yang lainnya adalah bahwa program GSMK telah diwujudkan sebelum adanya kebijakan tentang alokasi dana desa yang mulai diterapkan setelah adanya Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 tentang Desa. Hal ini berarti bahwa program GSMK dimunculkan dengan keberanian dari Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang memotong dana APBD nya dalam jumlah yang sangat besar untuk dialihkan kepada implementasi program GSMK tersebut.

Selain itu, masing-masing kampung memiliki tanggungjawab berupa pelaporan di akhir kegiatan GSMK. Laporan-laporan tersebut berupa laporan kemajuan kegiatan dan penggunaan dana tahap I berikut dokumentasi kondisi kemajuan fisik minimal 50% (persyaratan untuk pencairan II), laporan kemajuan II dan penggunaan dana tahap II berikut dokumentasi kondisi kemajuan fisik minimal 80% (persyaratan untuk pencairan III), laporan akhir dan surat pertanggungjawaban penggunaan dana berikut dokumentasi 100%.

Implementasi program GSMK, yang merupakan program unggulan dari Bupati Tulang Bawang, sudah berjalan sejak tahun 2013. Memasuki tahun ke lima, implementasi program GSMK tetap berjalan atas dasar gotong royong. Seperti latar belakang terbentuknya program GSMK yang didasari oleh budaya gotong royong yang ada di masyarakat. Pembangunan yang diserahkan langsung kepada kampung akan melahirkan pembangunan yang merata karena adanya rasa kebersamaan dan memiliki oleh warga kampung tersebut. Selanjutnya, terbangunnya kampung akan ikut memajukan pembangunan kabupaten. Program GSMK diimplementasikan satu tahun sebelum Pemerintah Pusat menetapkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa. Hal ini berarti bahwa Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang telah selangkah lebih cepat menemukan cara untuk membangun desa berdasar pada budaya masyarakat setempat. Ada perubahan pengalokasian dana tentu saja ketika sebelum dan sesudah adanya Undang-Undang Desa. Sebelum adanya Undang-Undang Desa, penyaluran dana untuk program GSMK dilakukan dalam bentuk alokasi dana kampung yang diambil dari APBD Kabupaten Tulang Bawang sebesar Rp200juta per kampung per tahun. Sementara setelah adanya Undang-Undang tentang Desa Tahun 2014, anggaran dana untuk implementasi program GSMK dinaikkan menjadi Rp225 juta per kampung pertahun diberlakukan mulai tahun 2015 sejak pembangunan tahap I. Anggaran tersebut bersumber dari dana desa (APBN) dan alokasi dana desa (APBD Kabupaten Tulang Bawang).

PEMBAHASAN

a. Pseudo Demokrasi di tahapan Implementasi GSMK

Pengajuan, perencanaan penggunaan dana, penyaluran, dan penggunaan dana program GSMK dilakukan melalui rantai komando yang hierarki dan tidak berubah baik sebelum atau sesudah adanya Undang-Undang tentang Desa. Perencanaan pembangunan dimulai dari hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Kampung (Musrenbang Kampung) yang dihimpun dari usulan setiap warga atau perwakilan warga yang ikut musyawarah tersebut. Hasil Musrenbang Kampung kemudian diusulkan ke Pemerintah Kecamatan yang akan dibahas dalam Musrenbang Kecamatan. Pada tahap ini, verifikasi oleh Asisten Teknis, Fasilitator Kecamatan beserta Camat setempat akan mengantarkan Tim Pembina dan Kordinasi Kecamatan

mengusulkan alokasi dana Bantuan Langsung Masyarakat Program GSMK ke Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang. Persetujuan Pemerintah Kabupaten akan dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati tentang Pelaksanaan Program GSMK yang diperbaharui setiap tahun. Langkah terakhir pada tahap perencanaan adalah Kampung melakukan penyusunan rincian kegiatan dan pembiayaan secara detail.

Terbitnya Surat Keputusan Bupati tentang Pelaksanaan Program GSMK berarti dimulainya pencairan dana pembangunan infrastruktur kampung yang jenis-jenisnya telah ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut. Dana GSMK akan disalurkan langsung kerekening Pokmas setelah sebelumnya Pokmas mengajukan permohonan pencairan dana kepada Tim Pembina dan Koordinasi Kabupaten (DPMK disetujui oleh Bupati) yang difasilitatori oleh Camat dan Fasilitator Kecamatan. Persyaratan pencairan dana untuk program GSMK disertai syarat-syarat yang berbeda setiap tahapnya. Persyaratan diajukan oleh Pokmas yang sengaja dibentuk khusus untuk mengurus program GSMK tersebut meliputi alokasi dana, lokasi pembangunan, bukti musyawarah dan beberapa bukti kesiapan pembangunan lainnya. Sampai dengan tahap ini, implementasi program GSMK telah menunjukkan keberhasilan tujuan program, yaitu inisiatif dan demokratis. Setiap pembangunan yang direncanakan berasal dari saran masyarakat kampung yang berdasar pada prioritas kebutuhan kampung. Masyarakat telah dipaksa untuk mau dan berani mengurus kampungnya masing-masing.

Pada tahap pelaksanaan program GSMK, yaitu pembangunan infrastruktur, Pokmas sebagai Ketua Tim Pelaksana Kegiatan memimpin koordinasi antar masyarakat dalam swadaya pembangunan. Gotong royong dan partisipatif menjadi kekuatan maha besar yang mampu mewujudkan terselesaikannya pelaksanaan program GSMK sampai dengan saat ini. Meski telah diberikan stimulan berupa dana bantuan untuk program GSMK, rasa kebersamaan dan jiwa gotong royong lah yang telah menjadikan terlaksananya program GSMK ini, rasa memiliki atas infrastruktur yang telah dibangun untuk kampung juga telah menciptakan keikhlasan dalam setiap swadaya yang diberikan dalam pelaksanaan program GSMK. Ada hal yang lebih penting, disadari atau tidak, tentang pengaruh tokoh masyarakat yang berkontribusi besar dalam mendorong muncul dan terjaganya jiwa-jiwa gotong royong, swadaya, dan partisipatif dari setiap warga yang menokohkan tokoh masyarakat tersebut. Program GSMK yang sering dikatakan mirip dengan program *sakai sambayan* ini nyatanya memang dilatarbelakangi oleh pengaruh emosional yang besar dari tokoh masyarakat. Misalnya adalah Kampung Kagungan Rahayu yang menjadi kampung percontohan dalam keberhasilan program GSMK, ada tokoh masyarakat bersuku Bali yang sangat disegani dan ditokohkan.

Kampung Kagungan Rahayu memang hampir dimayoritasi oleh warga bersuku Bali, serta dipimpin oleh Kepala Kampung bersuku Bali, seolah menjadi faktor pendukung bahwa ada pengaruh suku tertentu yang menjadikan program GSMK berhasil dan ada alasan karena suku tertentu program GSMK kurang berhasil. Hal yang perlu digarisbawahi disini adalah bahwa budaya setiap suku tidak selalu berbeda, ada beberapa budaya antar suku yang sama. Misalnya adalah gotong royong, memang benar Kabupaten Tulang Bawang yang merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Lampung akan mengedepankan budaya asli daerah yang dalam program GSMK ini mengedepankan budaya gotong royong dan disebut *sakai sambayan* dalam bahasa Lampung. Namun hal ini tidak berarti suku lain tidak menjadikan budaya gotong royong sebagai unsur utama dalam berkehidupan dimasyarakat. Dalam implementasi program GSMK, ada beragam suku yang tinggal di Kampung Kagungan Rahayu. Namun, kemampuan perangkat kampung dalam mengakomodir setiap elemen untuk mau berpartisipasi dan berswadaya dalam program GSMK menjadi hal umum yang membuktikan bahwa kapasitas kepemimpinan dalam setiap kampung merupakan hal utama,

untuk dapat merangkul toko adat, tokoh masyarakat, dan pemuda sehingga mampu menyalurkan pengaruh dan semangat gotong royong.

Selama proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur kampung, Tim Pembina dan Koordinasi Kabupaten akan melaporkan secara berkala setiap perkembangan pembangunan langsung kepada Bupati. Sedangkan dilapangan, ada Fasilitator Kecamatan yang setiap kecamatan hanya satu orang dibantu oleh Pokmas di masing-masing kampung yang mengawasi proses pembangunan. Hidup dan bertumbuhsuburnya jiwa gotong royong masyarakat kampung dapat dibuktikan dalam tahap pelaksanaan program GSMK ini. Ada banyak jenis swadaya yang dilakukan oleh masyarakat kampung. Banyak diantaranya swadaya tenaga, ada yang berswadaya berupa makanan dan minuman, ada yang merelakan sebagian tanahnya terpotong untuk pembangunan drainase, talud atau pembangunan infrastruktur lainnya. Selama proses pembangunan, permasalahan yang terjadi adalah faktor cuaca yang beberapa kali membuat hasil pembangunan tidak baik. Seperti pembangunan jembatan disalah satu kampung yang runtuh akibat hujan yang terus menerus turun sehingga pembangunan jembatan dinilai gagal. Namun hal ini segera dilaporkan oleh aparat kampung dan segera ditindak oleh Pemerintah Kabupaten melalui Tim Pembina dan Koordinasi Kabupaten.

Terselesaikannya pembangunan tahap I akan mewajibkan Pokmas membuat laporan pertanggungjawaban pembangunan tahap I yang akan menjadi salah satu syarat untuk pembangunan tahap II, begitu juga untuk pembangunan tahap III yang harus menyertakan bukti terselesaikannya pembangunan tahap II melalui laporan pertanggungjawaban. Evaluasi akan dilakukan setiap laporan pertanggungjawaban per tahap dilakukan. Program ini didampingi oleh beberapa instansi yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati didalam Surat Keputusan Bupati tentang Pelaksanaan Program GSMK yaitu meliputi Asisten Bidang Pemerintahan dan Sosial, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat, Bagian Sumber Daya Alam dan Infrastruktur, serta Bagian pemerintahan dan Otonomi Daerah. Kemudian untuk monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Tim Pembina dan Koordinasi Kecamatan bersama dengan Fasilitator Kecamatan yang selanjutnya pemeringkatan keberhasilan ditentukan dari kesepakatan rapat koordinasi. Hasil evaluasi akan disampaikan kepada Tim Pembina dan Koordinasi Kabupaten untuk kemudian ditetapkan dalam Keputusan Bupati tentang Penetapan Kelurahan Terbaik dalam Pelaksanaan Program GSMK di Kabupaten Tulang Bawang. Hadiah bagi kelurahan terbaik I berupa dana sejumlah Rp50 juta, terbaik II sejumlah Rp30juta, dan terbaik III sejumlah Rp20 juta.

Dana tersebut kemudian menjadi hak masing-masing kampung pemenang. Namun, banyak dari mereka yang menggunakan dana tersebut untuk penambahan dana pembangunan infrastruktur tahun berikutnya, sehingga jumlah pembangunan bisa melebihi target minimum yang telah ditetapkan. Selama ini, penggunaan dana GSMK adalah untuk membangun infrastruktur baru di kampung, belum ada dana yang digunakan untuk pemeliharaan infrastruktur yang sudah ada. Hal ini membuktikan bahwa upaya pembangunan infrastuktur kampung diratakan dan diprioritaskan kepada infrastruktur yang masih 0% sehingga setiap kebutuhan masyarakat atas fasilitas infrastruktur umum dapat dipenuhi. Untuk mewujudkan tujuan penggunaan berkelanjutan dari program GSMK, pemeliharaan infrastruktur diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat kampung melalui musyawarah yang dikoordinir oleh Pokmas Kampung setempat menggunakan dana iuran kampung yang disepakati atau jasa penggantian pemakaian sarana dan prasarana yang telah dibangun. Prinsip demokrasi berupa pembangunan dari, oleh dan untuk kampung telah genap terpenuhi jika setiap kampung mampu mengimplementasikan program GSMK dengan baik dan sesuai dengan arahan,

sehingga tujuan program tercapai dan nilai gotong royong, partisipatif, memiliki, dan tanggungjawab juga terpupuk dan dapat tumbuh subur dikampung.

Transparansi penerimaan dana, penggunaan sampai dengan kas yang tersisa wajib dilakukan oleh Pokmas dan Kepala Kampung kepada seluruh masyarakat kampung. Transparansi harus dilakukan ditempat-tempat umum yang sudah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dalam Surat Keputusan Bupati tentang Pelaksanaan Program GSMK. Prakteknya, transparansi lebih banyak dilakukan menggunakan media penyampaian berupa banner yang berisi informasi pemasukan, penggunaan dan sisa dana program GSMK yang dipasang didepan Balai Kampung. Melalui cara seperti ini, masyarakat dapat mengetahui jumlah dana yang diterima, dipakai dan yang tersisa.

Implementasi program GSMK di 147 Kampung dari 15 Kecamatan se-Kabupaten Tulang Bawang yang sampai saat ini telah disoroti banyak pihak karena keberhasilannya ternyata masih menyisakan kebiasaan menoleransi ketidakpatuhan atas peraturan yang ditetapkan. Hal yang paling jelas dan sudah membudaya adalah keterlambatan pembuatan laporan hasil pelaksanaan program GSMK yang berarti menunda pengajuan pencarian dana untuk tahap selanjutnya. Usulan kegiatan yang harusnya sudah diajukan ke Pemerintah Kabupaten pada bulan Maret harusnya dapat terlaksana pada bulan Juli dan selesai paling akhir pada akhir bulan November. Namun dalam prakteknya, sikap kurang tegas dari Tim Pembina dan Koordinasi Kabupaten dan pendampingan yang kurang dari Fasilitator Kecamatan telah membuat beberapa kampung mangkir dari kewajibannya membuat laporan pelaksanaan program tahap sebelumnya, sehingga menyebabkan pencairan dana program GSMK tahap selanjutnya tertunda. Hal ini kemudian berdampak pada tidak lagi serentak pelaksanaan program GSMK diseluruh kampung se-Kabupaten Tulang Bawang. Sikap toleransi dilonggarkan sehingga surat peringatan yang diberikan nyatanya tidak lantas membuat penyakit semacam ini terselesaikan. Tetap ada kampung yang belum menganggap laporan penting sehingga pembangunan infrastruktur yang seharusnya dapat bertambah lebih banyak dan lebih baik menjadi tertunda dan tertinggal dari kampung yang lebih kooperatif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan, implementasi program GSMK didasari oleh nilai demokrasi seperti nilai gotong royong, dari masyarakat oleh masyarakat dan untuk masyarakat Kabupaten Tulang Bawang. Nilai ini diharapkan menjadi kompas dalam pelaksanaan program GSMK di Kabupaten Tulang Bawang. Setiap tahapan implementasi dan perencanaan program GSMK bertumpu pada elite kampung. Dengan demikian, logika ini berarti demokrasi hanya pada level politik, sementara di level implementasi, hanya pura-pura demokrasi (pseudo demokrasi) bahkan tidak ada demokrasi. Persoalan inilah yang kemudian mengantarkan kita pada rekonstruksi paradigma kebijakan publik. Partisipasi publik, sebagai variabel utama dalam demokrasi, harus masuk secara menyeluruh. Pada titik inilah, proses penyusunan kebijakan publik harus bernilai partisipatif, alias memberdayakan masyarakat di semua proses kebijakan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, J.E. 1979. *Public Policy Making*. New York. Holt, Renihart and Winston.
- Dunn, William N. 2000, (1981). *Public Policy Analysis: An Introduction*. New Jersey: Perason Education. Edisi bahasa Indonesia diterjemahkan dari edisi kedua (1994) diterbitkan sejak 1998. Dengan judul pengantar analisis kebijakan publik. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.
- Moleong, L.J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant. 2008. *Public Policy*. Jakarta. PT. Elex Media Komputindo.

- Parsons, Wayne. 2008. *Public Policy (Pengantar Teori dan Praktek Analisis Kebijakan)*. Jakarta. Prenada Media Group.
- Putra, F. 2003. *Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta. Penerbit Gava Media.
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik, konsep, teori dan aplikasi*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung. PT. Alfabeta.
- Tarigan, Robinson. 2005. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta. PT. Bumi Aksara.
- Wahab, S.A. 2000. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Media Pressindo.